Urgensi Vaksin bagi Penghuni Panti

Ratusan penghuni panti sosial dan rumah sakit jiwa yang tersebar di seluruh Indonesia telah banyak yang terpapar Covid-19. Penanganan yang lambat mengakibatkan banyak panti sosial di Indonesia menjadi klaster baru virus corona. Sejak akhir Desember 2020 lalu hingga hari ini, sebanyak 221 penyandang disabilitas mental di Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa, Cipayung, Jakarta, [terkonfirmasi positif virus](https://megapolitan.kompas.com/read/2021/01/03/17193371/2-panti-sosial-di-cipayung-jaktim-jadi-klaster-ada-302-kasus-aktif-covid). Panti ini dikelola oleh Dinas Sosial DKI Jakarta. Selain itu, sebanyak 80 pasien di Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi, Makassar, juga [terpapar virus corona](https://regional.kompas.com/read/2021/01/02/13223111/80-pasien-gangguan-jiwa-di-rskd-dadi-makassar-positif-covid-19). Menurut pemantauan kami di media, beberapa rumah sakit jiwa (RSJ) yang juga mengalami kenaikan jumlah ini adalah [RSJ Menur, Surabaya](https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5090203/dokter-rs-jiwa-menur-meninggal-terpapar-covid-19), [RSJ Kota Kendari](https://kumparan.com/kendarinesia/1-pasien-rumah-sakit-jiwa-di-kendari-positif-covid-19-1uODnF0QbyE/full), Kendari, RSJ HB Saamin, Padang, dan [RSJ Mutiara Sukma](https://lombokpost.jawapos.com/ntb/07/06/2020/gangguan-jiwa-lima-pasien-rsj-selagalas-positif-korona/), Mataram. Tidak menutup kemungkinan bahwa kasus semacam ini juga bisa terjadi di panti-panti sosial yang lainnya.

Kasus ini telah menjadi kekhawatiran yang berusaha dicegah lewat berbagai upaya sebelumnya. Pada Maret 2020, Aliansi Masyarakat Sipil Peduli Isu Disabilitas telah melayangkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo untuk melakukan pencegahan dan penanganan kasus Covid-19 di panti-panti sosial disabilitas mental. Lima organisasi yang menyurati presiden itu adalah Perhimpunan Jiwa Sehat, Human Rights Watch, Human Rights Working Group, LBH Masyarakat, dan Indonesia Judicial Research Society. Surat itu berisi peringatan atas rentannya penghuni terhadap infeksi Covid-19 serta pentingnya perlindungan khusus bagi penyandang disabilitas. Aliansi juga telah melaksanakan pertemuan dengan Kantor Staf Presiden (KSP) untuk membahas masalah ini, dan KSP telah mengkoordinasikan ke sejumlah Kementerian dan Pemerintah Daerah. Akan tetapi, tidak ada perubahan penanganan berarti dari Pemerintah Pusat maupun Daerah terutama terkait pengelolaan, penanganan, dan pengawasan panti-panti sosial. Lonjakan kasus seperti yang diberitakan di media menunjukkan bahwa pemerintah tidak banyak melakukan apapun untuk menangani panti.

Situasi panti sosial sudah seharusnya menjadi perhatian serius dalam penanganan dan pencegahan kasus Covid-19, mengingat kapasitas, sanitasi, dan gizi di banyak panti disabilitas mental jauh dari kata layak. Petugas yang keluar masuk tanpa melakukan protokol kesehatan yang ketat, bangunan panti yang cenderung tertutup, sanitasi yang buruk, gizi yang tidak memadai, hingga pemasungan atau perantaian yang masih terjadi, sangat berpotensi meningkatkan risiko penyebaran virus di dalam panti sosial. Buruknya koordinasi Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah/Kota mengenai pengelolaan dan pengawasan panti juga menambah kompleksitas masalah ini.

Mempertimbangkan kondisi yang tidak banyak berubah, pada tanggal 7 Januari 2021 aliansi kembali menggelar konferensi pers untuk mendesak penanganan serius dari pemerintah. Beberapa tuntutan yang diajukan kepada pemerintah adalah memastikan kebijakan pencegahan dan penanganan Covid-19 (salah satunya 3M) juga diterapkan secara memadai dan layak di dalam panti-panti sosial baik milik pemerintah maupun swasta, melakukan tes swab dan rapid antigen secara berkala kepada penghuni dan petugas, moratorium penambahan penghuni panti, dsb. Dari rangkaian tuntutan tersebut, salah satu yang menjadi paling utama dan urgen untuk dilakukan adalah memasukkan petugas dan penghuni panti dalam prioritas pemberian vaksin.

Vaksinasi bagi seluruh penghuni dan pekerja panti menjadi sangat penting dan mendesak mengingat mereka yang tinggal di panti pada umumnya memang kelompok rentan, seperti peyandang disabilitas, anak-anak, dan lansia. Di banyak negara lainnya, para pekerja dan penghuni panti telah menjadi kelompok prioritas pemberian vaksin Covid-19, seperti [Inggris](https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-care-home-and-healthcare-settings-posters/covid-19-vaccination-first-phase-priority-groups), [Irlandia](https://www.gov.ie/en/publication/39038-provisional-vaccine-allocation-groups/), dan [Australia](https://www.health.gov.au/initiatives-and-programs/covid-19-vaccines/getting-vaccinated-for-covid-19/who-will-get-the-vaccines#covid19-vaccines-priority-rollout). Tidak hanya vaksinasi, protokol kesehatan juga diterapkan secara ketat dengan kontrol dan alur koordinasi yang jelas. Kebutuhan penunjang (APD, sarung tangan, sabun cuci tangan, desinfektan, obat-obatan, dsb) untuk memastikan protokol tersebut dapat berjalan turut disokong oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah sangat penting untuk menjamin setiap warga negaranya terlindungi dari virus Covid-19 lewat serangkaian kebijakan terkait pencegahan dan penanganan, tidak terkecuali penghuni panti sosial.

Saat ini, kasus Covid-19 di Indonesia terus meningkat, ribuan tenaga keseahtan dan penduduk Indonesia banyak yang telah meninggal, sebagian di antaranya adalah penghuni panti karena mereka sempat terlupa. Sudah saatnya permasalahan mengenai panti mendapat penanganan serius dengan memasukkan mereka ke dalam daftar prioritas penerima vaksin.

Catatan tambahan:

Rekaman diskusi “Prioritas Vaksinasi Covid-19 bagi Penghuni Panti Sosial, Mungkinkah?” dapat diakses melalui link berikut ini: <https://drive.google.com/drive/folders/1PuK19-qQyx3wkSc8t1qdrxVjX-KlL2a7?usp=sharing> . Adapun video yang ditayangkan pada saat diskusi dapat diakses melalui kanal Youtube kami “PJS Media”.